

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING (STUDI PADA
PUSKESMAS GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP)
IMPLEMENTATION OF REGENT REGULATION POLICY NUMBER 14 OF 2019
CONCERNING ACCELERATION OF STUNTING REDUCTION (STUDY AT GULUK-
GULUK HEALTH CENTER, SUMENEP DISTRICT)**

Oleh :

Nurul Anwar, idasyafriyani
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Wiraraja
E-mail: nurulanwar270502@gmail.com
idafisipunija@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the still high number of stunting in Indonesia in 2022 which reaches 21.6%, and the prevalence of stunting in East Java which reaches 19.2%, meanwhile Sumenep is in 15th place in East Java with 21.6%. the creation of Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction and Regent Regulation Number 14 of 2019 concerning the Acceleration of Stunting Reduction. The aim of this research is to determine the implementation of policies carried out by the Guluk-guluk health center in reducing stunting. The research method used in the research is a qualitative research method as data analysis with data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. This research uses implementation theory by Van Meter and Van Horn (1975) which has 6 indicators, namely: Policy Size and Objectives, Human Resources, Characteristics of Implementing Agents, Attitudes or Tendencies of Implementers, Inter-Organizational Communication and Implementing Activities, Social Environment, Economics , and Politics. The implementation of the stunting reduction policy at the Guluk-Guluk Community Health Center has been successful. The location I chose was the Guluk-guluk health center. The reason the researchers took the location at this location was because the Guluk-guluk community health center was able to reduce the stunting rate in Guluk-guluk sub-district. The results of the research were based on the research focus on the implementation of the stunting reduction policy at the Guluk-guluk community health center in accordance with what was determined, the implementers/executors had implemented the policy in accordance with the goals to be achieved. The resources involved in implementing stunting reduction are maximal. In the context of implementing stunting reduction policies, the implementing agents involved are quite democratic and persuasive. This affects the achievement of goals that will be achieved within the specified time limit.

Keywords: *Implementation, Policy, Stunting.*

Intisari

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih tingginya angka stunting di indonesia pada tahun 2022 yang mencapai 21,6%, dan prevelensi stunting di jawa timur yang mencapai 19,2% sementara itu sumenep berada di urutan ke 15 di jawatimur dengan mencapai 21,6% sehingga terciptanyalah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penanggulangan Stunting. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh puskesmas Guluk-guluk dalam penurunan stunting. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif sebagai analisi data dengan teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang memiliki 6 indikator yaitu : Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya Manusia, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Sosial, Ekonomi,

dan Politik. Implementasi kebijakan penurunan stunting di puskesmas guluk-guluk sudah berhasil. Lokasi yang saya pilih yaitu puskesmas Guluk-guluk. Alasan peneliti mengambil lokasi di lokasi tersebut dikarenakan puskesmas Guluk-guluk mampu menekan angka stunting di kecamatan Guluk-guluk, Hasil penelitian berdasarkan fokus penelitian implementasi kebijakan penurunan stunting di puskesmas guluk-guluk sudah sesuai dengan yang ditentukan, para implementor/pelaksana sudah melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sumber daya yang terlibat dalam implementasi penurunan stunting cukup maksimal. Pada konteks implementasi kebijakan penurunan stunting, agen pelaksana yang terlibat cukup demokratis dan persuasif. Hal ini mempengaruhi ketercapaian tujuan yang akan dicapai dengan batas waktu yang ditentukan.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Stunting.

1. PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang telah dirumuskan bersama oleh para pemangku kebijakan. Kebijakan publik memuat beberapa hal yang saling berkaitan antara keputusan yang telah ditetapkan dengan keputusan yang akan diimplementasikan.

Suatu Kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan-tujuan atau target-target yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Pengertian Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pejabat-pejabat pemerintah baik secara individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2005:65).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Dalam hal kepadatan penduduk, Indonesia berada di urutan ke empat, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Terdapat 7,8 juta anak stunting di seluruh dunia, data ini berdasarkan laporan yang dilakukan oleh UNICEF dan

memposisikan Indonesia sebagai salah satu dari lima negara dengan jumlah anak stunting tertinggi.

Angka stunting pada anak Indonesia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Laos yang mencapai 43,8%. Namun berdasarkan pemantauan status gizi (PSG) tahun 2021, bayi yang tercatat mengalami stunting dengan presentase sebesar 26,6%.

Angka stunting pada anak Indonesia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Laos yang mencapai 43,8%. Namun berdasarkan pemantauan status gizi (PSG) tahun 2021, bayi yang tercatat mengalami stunting dengan presentase sebesar 26,6%. Presentase tersebut sebesar 9,8% untuk kategori sangat pendek dan 19,8% untuk kategori pendek. Dalam 1.000 hari pertama, sebenarnya merupakan tahun emas bayi, namun kenyataannya di bulan pertama tersebut banyak sekali bayi usia 0 hingga 59 bulan yang justru mengalami gangguan makanan. Untuk mengurangi masalah gizi pada anak balita, pemerintah telah melaksanakan gerakan nasional pencegahan stunting kemitraan lintas sektor. dan kerjasama Tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan

(TNP2K) melaksanakan 160 kabupaten prioritas penurunan stunting.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,6%, dan prevalensi stunting di Jawa Timur sebesar 19,2%. Mengingat besarnya jumlah anak kecil di Jawa Timur, maka jumlah anak kecil yang mengalami stunting juga cukup besar. Stunting merupakan masalah global yang mempengaruhi masadepan negara. Balita pendek (stunting) adalah status gizi berdasarkan indeks PB/U atau tinggi badan berdasarkan usia TB/U yang merupakan standart antropometri untuk menilai status gizi anak, yang hasil pengukurannya berada dalam ambang batas (Z-score) <-2 SD sampai dengan -3 SD (pendek/stuted) dan <-3 SD (sangat pendek/severely stunted). (Fahmil Usman 2020).

Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, peraturan presiden ini merupakan kerangka hukum strategi nasional (Starnas) percepatan penurunan stunting yang diluncurkan dan dilaksanakan pada tahun 2018. Peraturan presiden juga berfungsi untuk memperkuat kerangka intervensi dan lembaga pelaksana untuk mempercepat penurunan stunting. Hal tersebut dikarenakan angka stunting di masyarakat terlihat semakin meningkat.

Perpres ini mengatur antara lain mengenai: 1) strategi nasional percepatan penurunan stunting; 2) penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; 3)

koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 5) pendanaan. Peraturan Bupati nomor 14 tahun 2019 tentang percepatan penanggulangan stunting, peraturan bupati bertujuan untuk mencegah sekaligus meningkatkan status gizi masyarakat termasuk dalam mas 1000 HPK serta anak balita agar terwujud sumberdaya manusia yang sehat dan berkualitas.

Dengan adanya peraturan seperti ini diharapkan pemerintah khususnya Kecamatan Guluk-guluk lebih memperhatikan pelaksanaan peraturan presiden Nomor 72 tahun 2021. Masyarakat khususnya Kecamatan Guluk-guluk juga dihimbau untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh program stunting yang dilaksanakan baik di puskesmas maupun di kecamatan tersebut. Maka dengan adanya sinergi antara masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat menurunkan angka stunting pada anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

Penyebab utama tingginya angka stunting pada balita di puskesmas guluk-guluk adalah kurangnya pemahaman orang tua tentang pola pengasuhan anak, terutama dalam hal memberikan asupan gizi, serta faktor ekonomi yang menyebabkan kekurangan gizi kronis sejak kehamilan sampai dua tahun terakhir, atau 1,000 hari pertama kehidupan.

Berdasarkan permasalahan yang telah

diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Studi Pada Puskesmas Guluk-guluk Kabupaten Sumenep).

2. TINJAUAN TEORITIS

Administrasi Publik

Administrasi publik dipandang mempunyai peran yang penting dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara. Beberapa pakar administrasi menggunakan terminologi "public policy", dengan istilah yaitu kebijakan publik serta__kebijaksanaan publik. Adapun istilah dari kebijakan itu sendiri mengarah kepada penduduk yang dikeluarkan oleh badan publik berbentuk peraturan perundang-undangan serta keputusan.

Menurut Nicolas Henry (1988) dalam (pasolong, 2019), mendefinisikan administrasi publik adalah sebuah kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efesiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang diambil

dalamsekelompok politik dengan cara untuk mencapai sebuah tujuan yang mana berdasarkan pada kebijakan-kebijakan pada kekuasaan. Secara teori, kebijakan ini dapat diberlakukan oleh mereka yang membuatnya.

Menurut Ayuningtyas (2014), Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan di mana setiap individu tersebut menjaga kelompok dengan adanya keputusan-keputusan kebijakan yang ada di dalamnya.

Lasswell dan Kaplan mendefinisikan kebijakan sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan adanya tujuan, nilai, dan praktik serta sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan.

Suatu kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan – tujuan atau target – target yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Pengertian Implementasi Kebijakan adalah tindakan – tindakan yang dilakukan pejabat – pejabat pemerintah baik secara individu ataupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2005: 65).

Model Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn

Model Implementasi Kebijakan Publik Dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, strategi implementasi kebijakan disebut sebagai —A Model of the Policy Implementation. Proses

implementasi ini merupakan abstraksi atau kinerja dari pemahaman kebijakan yang pada hakekatnya dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan yang tinggi berdasarkan hubungan antara berbagai variabel.

Variabel-variabel model kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- 2) Sumber Daya
- 3) Karakteristik Agen pelaksana
- 4) Sikap atau Kecenderungan Pelaksana
- 5) Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
- 6) Lingkungan Sosial, Ekonomi, Sosial, dan Politik

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kualitatif ada yang biasa disebut dengan batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang dimana berisi tentang pokok masalah yang masih bersifat umum.

Fokus yang di gunakan yaitu variabel" implementasi kebijakan publik model Van meter dan Van horn sebuah teori yang di kemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn sebagai berikut:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
- Tingkat keberhasilan ukuran dan

tujuan kebijakan yang realistis untuk lingkungan sosial budaya pada tingkat implementasi kebijakan dapat digunakan sebagai ukuran kinerja.

2) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

3) Karakteristik organisasi pelaksana.

Metode penelitian yang digunakan dijelaskan tentang pendekatan apa yang digunakan, data yang digunakan, cara pengumpulan data, dan cara analisis data

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Guluk-guluk

Sumber Data Penelitian

Data Primer

Data primer pada penelitian ini dikumpulkan dari sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yakni diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait meliputi:

1. Kepala Puskesmas Guluk – Guluk : DR. Sari Yuli Yarti, M. Kes
2. Pj Program Gizi : Intan Dwi Novitasari Amd., Gz
3. Masyarakat : Ibu dari bayi penderita stunting

Data Sekunder

Data sekunder yang didapatkan peneliti melalui kajian literatur seperti: jurnal, Media cetak, atau media online, beberapa buku terkait, serta data atau informasi dari Puskesmas Guluk-guluk baik data berupa dokumen, arsip ataupun lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan Sugiyono (2022:224). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan dilihat dari kemampuan pelaksana kebijakan dalam ketepatan saaran dan target yang telah di tentukan sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa : “Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran

tersebut” (Sulaeman, 1998).

Dalam rangka percepatan penurunan stunting puskesmas guluk-guluk merealisasikan beberapa program serta melibatkan lintas sektor pelaksana kebijakan yang terlibat dalam program puskesmas sudah melaksanakan program sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang ada, dengan adanya program serta plaksana kebijakan yang di siplin puskesmas guluk-guluk mampu menurunkan angka stunting di tiga tahun terakhir, pada tahun 2022 sebanyak 59 balita dari 3299 sasaran, pada tahun 2023 sebanyak 143 balita dari 3299 sasaran sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 93 balita dari 2998 sasaran.

2. Sumber Daya

Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa : Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan.

dalam rangka percepatan penurunan stunting puskesmas memanfaatkan sumberdaya yang ada sebagai mana yang di sampaikan oleh Van Meter dan Van Horn bahwasanya sumberdaya terbagi menjadi tiga yaitu sumberdaya manusia, finansial dan waktu, puskesmas guluk-guluk melibatkan sumberdaya yang berkualitas serta sesuai dengan keahlian masing-masing seperti Dokter, Petugas Gizi, Perawat, Bidan, Koordinator Pelayanan

Imunisasi, Koordinator Pelayanan Gizi, Kader Kesehatan dan Guru.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Agen pelaksana kebijakan yang terlibat meliputi organisasi formal maupun organisasi informal. Kinerja implementasi kebijakan dari organisasi pelaksana dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan.

Dalam percepatan penurunan stunting puskesmas bukan hanya melibatkan lintas program akan tetapi juga melibatkan lintas sektor atau organisasi formal dan organisasi informal.

Agen pelaksana kebijakan yang terlibat meliputi organisasi formal maupun organisasi informal. Berikut organisasi yang terlibat:

1. PKK
2. KUA
3. CAMAT
4. DESA
5. KADER
6. PERTANIAN
7. PENDIDIKAN

5. PENUTUP

Implementasi kebijakan penurunan stunting di puskesmas guluk-guluk sudah sesuai dengan yang ditentukan, para implementor/pelaksana sudah melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, Sumber daya yang terlibat dalam implementasi penurunan stunting cukup maksimal. Sumber daya manusia yang terlibat

dalam hal ini sangat berkompeten, Pada konteks implementasi kebijakan penurunan stunting, agen pelaksana yang terlibat cukup demokratis dan persuasif. Hal ini mempengaruhi ketercapaian tujuan yang akan dicapai dengan batas waktu yang ditentukan.

Saran

Implementor/pelaksana diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja sesuai tugas, pokok dan fungsi agar pada pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kompetensi sumber daya pelaksana perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan guna memperoleh keberhasilan yang sangat memuaskan pada program berikutnya serta kepuasan bagi masyarakat. Diharapkan terus membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan organisasi pelaksana serta mampu membangun networking yang lebih luas antar organisasi pelaksana demi mengsucceskan tujuan yang telah ditetapkan pada program yang dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifa, I., & Setyowati, S. (2023). *PEMBERDAYAAN KADER POSYANDU TERHADAP KEJADIAN STUNTING PADA BALITA DI INDONESIA: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW*. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(3), 2260-2268.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bappenas. (2021, Agustus 27). *Perpres Percepatan Penurunan Stunting untuk Perbaikan Gizi Indonesia*. Retrieved from [perpres-percepatan-penurunanstunting-untuk-perbaikan-](#)

- gizi-indonesia:
<https://www.bappenas.go.id/id/berita/perpres-percepatan-penurunanstunting-untuk-perbaikan-gizi-indonesia-20Pyg>
- Dunn, William. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. 1999. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- HENDRA, N. H. P. (2023). LITERATURE REVIEW: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI WILAYAH PESISIR MEDAN BELAWAN. *Miracle Journal*, 3(2), 52-57.
- Kemenkes RI. Survei Kesehatan Dasar Indonesia. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2012.
- Kiranasari, F., Tohardi, A., & Aisyah, S. (2024). Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 1216-1227.
- Norsanti, N. (2021). Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar). *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(1), 10-21.
- Shauma NU, & Purbaningrum, Dirjen (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13 (2), 200-207.